

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LKjIP)**  
**TAHUN 2018**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA PADANG PANJANG**

JL. Sutan Syahrir No. 189. ☎(0752) 83143 Padang Panjang-  
Kelurahan SilaingBawah Padang Panjang Barat  
Kota Padang Panjang27118

## DAFTAR ISI

Hal :

	PENDAHULUAN	
BAB I	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Dasar Hukum ... ..	2
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
	1.4. Sistematika.....	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	4
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	4
	2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	8
	2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .....	9
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	10
	1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	11
	1.3 Program dan Kegiatan .....	11
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	13
BAB V	PENUTUP .....	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor : 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan salah satu Dinas Daerah Eselon II yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan dibidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan tugas pokok utamanya adalah melaksanakan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dengan fungsi utamanya melakukan :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas dibidang Administarsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Setiap tahun sebelum pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun dan membuat **Rencana Kerja** yang disingkat dengan RENJA. Rencana Kerja merupakan perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran agar pembangunan yang dilaksakan mencapai sasaran yang diinginkan. Penyusunan Renja Tahun 2019 saat ini mempedomani RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, dan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

### B. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebagai acuan dalam penggunaan anggaran berbasis kinerja dan menunjang kepada pencapaian tugas pokok dan fungsi OPD dengan merujuk kepada pencapaian RPJMD, RPJPD Kota Padang Panjang, Renstra Kementerian Dalam Negeri, RPJP dan RPJMD Propinsi Sumatera Barat.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu Tahun Anggaran yaitu Tahun 2019

3. Sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dijadikan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2019.
4. Sebagai acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta pedoman dan pengendalian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun berjalan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN 1.5. Latar Belakang 1.6. Dasar HUKum 1.7. Maksud dan Tujuan 1.8. Sistematika
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah 2.6 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.7 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.8 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 4.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### A. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Tahun 2019 adalah Tahun Pertama Penyusunan Renja dan Renstra OPD untuk Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang terpilih periode Tahun 2019 – 2023, maka untuk mengevaluasi Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Tahun lalu belum dapat kami Lakukan, dan akan bisa dilakukan pada Tahun Kedua yaitu Tahun 2020, karena kalau kita mengevaluasi juga maka yang kita evaluasi adalah Renja Tahun 2017 atau 2018 yang berarti kita mempedomani Renstra OPD Tahun 2013 – 2018 dengan Kepemimpinan yang lama.

Namun demikian dalam hal ini dapat juga kami paparkan bahwa, dalam rentang Waktu 2013 s/d 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah melaksanakan program dan Kegiatan yang sesuai dengan Renstra yang telah dibuat dan mendukung kepada pencapaian RPJMD Kota Padang Panjang dengan :

a. **Prioritas Pembangunan :**

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik dan bersih

b. **Sasaran :**

Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang efektif dan Efisien

c. **Program :**

Penataan Administrasi Kependudukan

d. **Indikator :**

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah khususnya di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, dimana target terakhirnya adalah SANGAT BAIK. Dan didukung saat ini Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berstandarkan ISO 2009-2015.

### B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu : melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan fungsinya melakukan :

- a. Perencanaan, Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta UPTD,
- d. Pengelolaan dan penatausahaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- e. Dan Pelaksanaan tugas tugas lain yang diserahkan Walikota sesuai dengan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang selama periode 2013-2018 telah melakukan kerjanya dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut dapat dilihat melalui gambaran mengenai perkembangan jumlah penduduk dan Kepala Keluarga di Kota Padang Panjang selama empat tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang  
Tahun 2014-2017

No	Kecamatan/ Kelurahan	2014				2015				2016				2017			
		Penduduk			KK	Penduduk			KK	Penduduk			KK	Penduduk			KK
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
I	<b>PADANG PANJANG TIMUR</b>	<b>10.644</b>	<b>10.502</b>	<b>21.146</b>	<b>5.595</b>	<b>10.844</b>	<b>10.589</b>	<b>21.433</b>	<b>5.738</b>	<b>10.845</b>	<b>10.625</b>	<b>21.470</b>	<b>5.824</b>	<b>11.236</b>	<b>10.919</b>	<b>22.155</b>	<b>6.168</b>
1	Ganting	1.225	1.220	2.445	626	1.304	1.255	2.559	665	1.307	1.264	2.571	678	1.358	1.294	2.652	710
2	Sigando	865	831	1.696	443	872	835	1.707	449	873	833	1.706	456	886	846	1.732	469
3	Ekor Lubuk	1.182	1.132	2.314	646	1.156	1.134	2.290	654	1.167	1.133	2.300	665	1.199	1.163	2.362	692
4	Ngalau	1.233	1.266	2.499	670	1.308	1.297	2.605	699	1.305	1.317	2.622	711	1.363	1.365	2.728	758
5	Guguk Malintang	2.833	2.858	5.691	1.467	2.860	2.837	5.697	1.495	2.832	2.824	5.656	1.507	2.971	2.950	5.921	1.647
6	Koto Panjang	1.975	1.871	3.846	1.002	2.008	1.898	3.906	1.021	2.025	1.912	3.937	1.038	2.071	1.972	4.043	1.095
7	Koto Katik	469	454	923	263	476	464	940	271	474	473	947	277	500	480	980	287
8	Tanah Pak Lambik	862	870	1.732	478	860	869	1.729	484	862	869	1.731	492	888	849	1.737	510
II	<b>PADANG PANJANG BARAT</b>	<b>14.824</b>	<b>14.800</b>	<b>29.624</b>	<b>7.819</b>	<b>14.933</b>	<b>14.858</b>	<b>29.791</b>	<b>7.979</b>	<b>14.978</b>	<b>14.877</b>	<b>29.855</b>	<b>8.101</b>	<b>15.493</b>	<b>15.446</b>	<b>30.939</b>	<b>8.571</b>
1	Bukit Surungan	1.156	1.147	2.303	585	1.178	1.157	2.335	603	1.163	1.168	2.331	615	1.205	1.178	2.383	652
2	Pasar Usang	1.827	1.877	3.704	996	1.832	1.848	3.680	996	1.834	1.855	3.689	1.009	1.855	1.853	3.708	1.043
3	Kampung Manggis	3.085	3.009	6.094	1.598	3.102	3.039	6.141	1.636	3.104	3.033	6.137	1.650	3.286	3.222	6.508	1.795
4	Silaing Bawah	2.562	2.621	5.183	1.343	2.594	2.634	5.228	1.382	2.609	2.619	5.228	1.401	2.724	2.754	5.478	1.486
5	Sialing Atas	1.186	1.135	2.321	629	1.183	1.157	2.340	651	1.192	1.156	2.348	667	1.248	1.210	2.458	697
6	Pasar Baru	717	703	1.420	379	730	724	1.454	392	732	721	1.453	399	761	755	1.516	415
7	Tanah Hitam	1.664	1.656	3.320	910	1.666	1.660	3.326	912	1.693	1.682	3.375	946	1.673	1.731	3.404	981
8	Balai-Balai	2.627	2.652	5.279	1.379	2.648	2.639	5.287	1.407	2.651	2.643	5.294	1.414	2.741	2.743	5.484	1.502
	<b>JUMLAH</b>	<b>25.468</b>	<b>25.302</b>	<b>50.770</b>	<b>13.414</b>	<b>25.777</b>	<b>25.447</b>	<b>51.224</b>	<b>13.717</b>	<b>25.823</b>	<b>25.502</b>	<b>51.325</b>	<b>13.925</b>	<b>26.729</b>	<b>26.365</b>	<b>53.094</b>	<b>14.739</b>

Dilihat dari Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Padang Panjang dari tahun 2014-2017 terdapat peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 3,33% dari tahun 2016 dengan kepemilikan KK 100%.

Selanjutnya dilihat dari kepemilikan KTP elektronik yaitu penduduk yang telah merekam KTP- elektronik penduduk Kota Padang Panjang dari tahun 2014-2017 sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk Wajib KTP dan telah Memiliki KTP elektronik Tahun 2014-2017

No	Kecamatan/ Kelurahan	2014			2015			2016			2017		
		Penduduk			Penduduk			Penduduk			Penduduk		
		WAJIB KTP-el	YANG TELAH REKAM KTP-el	%	WAJIB KTP-el	YANG TELAH REKAM KTP-el	%	WAJIB KTP-el	YANG TELAH REKAM KTP-el	%	WAJIB KTP-el	YANG TELAH REKAM KTP-el	%
I	<b>PADANG PANJANG TIMUR</b>	<b>14.612</b>	<b>12.853</b>	<b>87,96</b>	<b>15.403</b>	<b>14.197</b>	<b>92,17</b>	<b>15.474</b>	<b>15.474</b>	<b>100</b>	<b>15.132</b>	<b>14.853</b>	<b>98,2</b>
1	Ganting	1.667	1.466	87,94	1.864	1.630	87,45	1.822	1.822	100	1.775	1.735	97,7
2	Sigando	1.143	1.021	89,33	1.208	1.091	90,31	1.193	1.193	100	1.160	1.134	97,8
3	Ekor Lubuk	1.785	1.367	76,58	1.706	1.512	88,63	1.654	1.654	100	1.605	1.574	98,1
4	Ngalau	1.584	1.506	95,08	1.916	1.763	92,01	1.910	1.910	100	1.886	1.860	98,6
5	Guguk Malintang	3.914	3.456	88,30	4.215	3.781	89,70	4.110	4.110	100	4.046	3.978	98,3
6	Koto Panjang	2.620	2.337	89,20	2.483	2.563	103,22	2.819	2.819	100	2.755	2.696	97,9
7	Koto Katik	659	595	90,29	711	665	93,53	699	699	100	677	666	98,4
8	Tanah Pak Lambik	1.240	1.105	89,11	1.300	1.192	91,69	1.267	1.267	100	1.228	1.210	98,5
II	<b>PADANG PANJANG BARAT</b>	<b>20.444</b>	<b>18.038</b>	<b>88,23</b>	<b>22.045</b>	<b>19.828</b>	<b>89,94</b>	<b>21.587</b>	<b>21.587</b>	<b>100</b>	<b>21.329</b>	<b>20.695</b>	<b>97,0</b>
1	Bukit Surungan	1.578	1.360	86,19	1.730	1.512	87,40	1.684	1.684	100	1.658	1.602	96,6
2	Pasar Usang	2.548	2.246	88,15	2.703	2.474	91,53	2.625	2.625	100	2.558	2.488	97,3
3	Kampung Manggis	4.255	3.751	88,16	4.584	4.015	87,59	4.485	4.485	100	4.492	4.337	96,5
4	Silang Bawah	3.589	3.208	89,38	3.814	3.513	92,11	3.789	3.789	100	3.780	3.703	98,0
5	Sialing Atas	1.614	1.423	88,17	1.760	1.558	88,52	1.707	1.707	100	1.682	1.645	97,8
6	Pasar Baru	930	803	86,34	1.014	900	88,76	1.003	1.003	100	1.002	974	97,2
7	Tanah Hitam	2.330	2.066	88,67	2.497	2.295	91,91	2.469	2.469	100	2.360	2.302	97,5
8	Balai-Balai	3.600	3.181	88,36	3.943	3.561	90,31	3.825	3.825	100	3.797	3.644	96,0
	<b>JUMLAH</b>	<b>35.056</b>	<b>30.891</b>	<b>88,12</b>	<b>37.448</b>	<b>34.025</b>	<b>90,86</b>	<b>37.061</b>	<b>37.061</b>	<b>100</b>	<b>36.461</b>	<b>35.548</b>	<b>97,5</b>

Dilihat dari tabel perkembangan kepemilikan KTP elektronik penduduk Kota Padang Panjang dapat dilihat bahwa realisasi perekaman KTP elektronik penduduk Kota Padang Panjang tahun 2017 masih 97.5 %. Realisasi perekaman untuk mencapai 100% masih belum dapat dicapai mengingat masih ada penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik karena beberapa kendala, diantaranya masih banyak penduduk yang berada di luar daerah Kota Padang Panjang. Hal ini tentu akan menjadi perhatian pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang mendatang.

Selanjutnya dari sisi Pencatatan Sipil yaitunya Akta Kelahiran dalam hal Kepemilikan Akta Kelahiran penduduk di Kota Padang Panjang selama tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Kota Padang Panjang  
Tahun 2014-2017

No	Kecamatan/ Kelurahan	2014			2015			2016			2017		
		Penduduk			Penduduk			Penduduk			Penduduk		
		PENDUDUK	PUNYA AKTA	%	PENDUDUK	PUNYA AKTA	%	PENDUDUK	PUNYA AKTA	%	PENDUDUK	PUNYA AKTA	%
<b>I</b>	<b>PADANG PANJANG TIMUR</b>	<b>21.146</b>	<b>12.386</b>	<b>58,57</b>	<b>21.433</b>	<b>12.991</b>	<b>60,61</b>	<b>21.470</b>	<b>16.834</b>	<b>78,41</b>	<b>22.155</b>	<b>17.474</b>	<b>78,87</b>
1	Ganting	2.445	1.457	59,59	2.559	1.563	61,08	2.571	2.022	78,65	2.652	2.056	77,53
2	Sigando	1.696	1.017	59,96	1.707	1.047	61,34	1.706	1.289	75,56	1.732	1.338	77,25
3	Ekor Lubuk	2.314	1.371	59,25	2.290	1.418	61,92	2.300	1.747	75,96	2.362	1.726	73,07
4	Ngalau	2.499	1.456	58,26	2.605	1.590	61,04	2.622	2.190	83,52	2.728	2.302	84,38
5	Guguk Malintang	5.691	3.333	58,57	5.697	3.466	60,84	5.656	4.424	78,22	5.921	4.354	73,53
6	Koto Panjang	3.846	2.181	56,71	3.906	2.272	58,17	3.937	3.066	77,88	4.043	3.451	85,36
7	Koto Katik	923	492	53,30	940	525	55,85	947	664	70,12	980	851	86,84
8	Tanah Pak Lambik	1.732	1.079	62,30	1.729	1.110	64,20	1.731	1.432	82,73	1.737	1.396	80,37
<b>II</b>	<b>PADANG PANJANG BARAT</b>	<b>29.624</b>	<b>17.626</b>	<b>59,50</b>	<b>29.791</b>	<b>18.449</b>	<b>61,93</b>	<b>29.855</b>	<b>23.488</b>	<b>78,67</b>	<b>30.939</b>	<b>23.873</b>	<b>77,16</b>
1	Bukit Surungan	2.303	1.299	56,40	2.335	1.381	59,14	2.331	1.668	71,56	2.383	1.648	69,16
2	Pasar Usang	3.704	2.333	62,99	3.680	2.389	64,92	3.689	3.129	84,82	3.708	3.140	84,68
3	Kampung Manggis	6.094	3.425	56,20	6.141	3.636	59,21	6.137	4.778	77,86	6.508	4.878	74,95
4	Silaing Bawah	5.183	3.156	60,89	5.228	3.282	62,78	5.228	4.200	80,34	5.478	4.398	80,28
5	Sialing Atas	2.321	1.493	64,33	2.340	1.538	65,73	2.348	1.974	84,07	2.458	2.004	81,53
6	Pasar Baru	1.420	792	55,77	1.454	881	60,59	1.453	1.089	74,95	1.516	1.118	73,75
7	Tanah Hitam	3.320	2.064	62,17	3.326	2.171	65,27	3.375	2.730	80,89	3.404	2.728	80,14
8	Balai-Balai	5.279	3.064	58,04	5.287	3.171	59,98	5.294	3.920	74,05	5.484	3.959	72,19
<b>JUMLAH</b>		<b>50.770</b>	<b>30.012</b>	<b>59,11</b>	<b>51.224</b>	<b>31.440</b>	<b>61,38</b>	<b>51.325</b>	<b>40.322</b>	<b>78,56</b>	<b>53.094</b>	<b>41.347</b>	<b>77,88</b>

Pada tabel kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Kota Padang Panjang tahun 2014-2017 dapat dilihat bahwa setiap tahun realisasi penduduk Kota Padang Panjang yang memiliki Akta Kelahiran mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 kepemilikan Akta Kelahiran meningkat dari tahun 2016 sebesar 2.48%. Melihat masih terdapatnya penduduk Kota Padang Panjang yang belum memiliki Akta Kelahiran sampai akhir tahun 2017 maka hal tersebut akan menjadi perhatian untuk Renja selanjutnya bagaimana seluruh penduduk Kota Padang Panjang memiliki Akta Kelahiran.

Kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Beberapa kinerja pelayanan pada Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemahaman aparatur pengelola administrasi kependudukan dan masyarakat dalam hal proses penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan;

- b. Peningkatan realisasi terhadap target perekaman KTP elektronik melalui kegiatan perekaman KTP elektronik ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang Panjang, Kelurahan-kelurahan, rumah-rumah penduduk, dan masyarakat penyandang disabilitas;
  - c. Jumlah realisasi kepemilikan Akta Kelahiran penduduk di Kota Padang Panjang yang meningkat dengan diadakannya kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil ke Kelurahan-kelurahan di Kota Padang Panjang, serta melibatkan Ketua RT masing-masing kelurahan untuk kepengurusan akta kelahiran penduduk;
  - d. Mengikatnya informasi pendaftaran penduduk pada masyarakat melalui media cetak dan elektronik dalam hal pengurusan dokumen kependudukan;
  - e. Terlaksananya rapat koordinasi dalam hal perumusan kebijakan kependudukan dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se- Sumatera Barat;
  - f. Terlaksananya penataan arsip pencatatan sipil dan dokumen kependudukan Kota Padang Panjang dalam bentuk file data per Keluarga yang disusun menurut RT, Kelurahan, dan Kecamatan, serta dokumen kependudukan lainnya seperti arsip surat keterangan pindah;
2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Beberapa kinerja pelayanan pada bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai berikut:
- a. Terlaksananya pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, perawatan peralatan SIAK serta *ter-update*-nya data dan program SIAK yang mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. Peningkatan pemahaman aparatur pengelola SIAK dengan diikutinya pelatihan mengenai pengelolaan SIAK oleh aparatur pengelola SIAK
  - c. Keakuratan data kependudukan di Kota Padang Panjang dengan dilaksanakannya monitoring, evaluasi, validasi dan pemutakhiran data kependudukan dengan melibatkan RT se Kota Padang Panjang melalui verifikasi data Kartu Keluarga
  - d. Tersedianya data kependudukan melalui kegiatan penerbitan buku Profil Perkembangan Kependudukan dan Buku Agregat Kependudukan di Kota Padang Panjang yang datanya dapat dipergunakan oleh dinas/instansi serta pengguna lainnya;
  - e. Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
  - f. Dipertahankannya sertifikat ISO 9001:2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang setelah dilakukannya audit eksternal oleh tim audit sertifikasi pelayanan.

### **C. Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang Panjang yang menjadi isu-isu penting adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Adm /dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

2. Tidak adanya sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang tidak mengurus atau terlambat mengurus adm Kependudukan dan Pencatatan sipil
3. Masih kurang sosialisasi dan publikasi mengenai adm Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Rendahnya pemahaman masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan adm Kependudukan dan pencatatan sipil
6. Masih kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang terampil dalam penyelenggaraan Adm Kependudukan dan pencatatan sipil
7. Kurangnya Regulasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang Adm Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan adm kependudukan dan pencatatan sipil
9. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam mengelola sistem informasi adm kependudukan
10. Kurangnya perangkat penyelenggaraan Pengelolaan informasi Adm kependudukan
11. Belum tersedianya sarana informasi berupa Website dan Pelayanan Online dalam penyelenggaraan layanan Adm Kependudukan
12. Lambatnya proses konsolidasi data kependudukan dari daerah diproses oleh pemerintahan pusat
13. Kurangnya Sosialisasi Pemanfaatan data kependudukan kepada instansi terkait terutama berkenaan dengan Perjanjian Kerjasama
14. Kurangnya kesempatan mengikuti bimbingan teknis berkenaan dengan pelayanan dan sistem informasi dan aplikasi bagi aparat

#### **D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berkenaan dengan penelaahan usulan program dan kegiatan yang datang dari masyarakat, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil program dan kegiatan disusun untuk pemberian kesadaran kepada masyarakat dan tidak ada usulan itu yang datang dari masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri memuat Isu Strategis aspek pemerintahan umum yang terkait dengan masalah kependudukan. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 232,4 juta jiwa pada tahun 2009, kebijakan penataan kependudukan memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional. Upaya penataan administrasi kependudukan difokuskan pada penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang didukung oleh empat subsistem berupa pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan, dan pendayagunaan data secara konsekuen, terpadu dan berkelanjutan dari tingkat nasional sampai daerah. Namun demikian, upaya penataan administrasi kependudukan pada beberapa tahun terakhir masih mengalami berbagai kendala, terkait dengan data base kependudukan, penegakan regulasi, dan dukungan SDM. Untuk itu tantangan kedepan yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut adalah diarahkan pada pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal secara nasional pada tahun 2011, dengan dukungan teknologi informasi pengolahan data yang terintegrasi.

Adapun misi dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri salah satunya adalah Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dengan salah satu tujuannya adalah terciptanya tertib administrasi kependudukan. Sedangkan sasaran renstra kemendagri dibidang kependudukan adalah :

- Tertibnya database kependudukan dan pelayanan kependudukan;
- Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan; dan
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

Dari Telaahan atau analisis Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Propinsi Sumatera Barat dihubungkan dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pencapaian renstra dimaksud. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah:

1. Adanya dukungan pimpinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. Data base dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dijadikan sebagai data nasional dan akan diintegrasikan dengan lembaga lain.
4. Dukungan dana APBN untuk pelaksanaan pelayanan kependudukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah:

1. Masih kurangnya kompetensi dan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan persyaratan dan tuntutan pekerjaan.
2. Adanya keterbatasan anggaran Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk melaksanakan kegiatan skala menengah keatas karena minimalnya pagu anggaran yang telah ditetapkan.

3. Masih kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dalam pemanfaatan database hasil pelayanan SIAK

## **B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan pelaksanaan dan realisasi pertahun dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan perkantoran
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran
3. Meningkatkan disiplin aparatur
4. Meningkatkan kualitas kerja aparatur yang profesional
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kependudukan
7. Meningkatkan pengelolaan informasi adminduk yang terintegrasi secara nasional

Sedangkan yang menjadi sasaran dari Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya layanan perkantoran yang memadai
2. Terwujudnya sarana dan prasarana yang representatif
3. Terwujudnya Sumber daya manusia yang punya etos kerja
4. Terwujudnya aparatur yang profesional
5. Terwujudnya laporan yang efektif dan efisien serta akuntabel
6. Terwujudnya Administrasi Kependudukan yang akurat dan akuntabel
7. Terwujudnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional

## **C. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut

### **PRIORITAS PERTAMA**

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan :
  - a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
  - d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
  - e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
  - f. Kegiatan penyediaan barang cetak dan pengandaan
  - g. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - h. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
  - i. Kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
  
3. Program peningkatan peningkatan disiplin aparatur dengan :
  - a. Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
  
4. Program peningkatan SDM Aparatur dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
  
5. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan laporan kinerja keuangan perangkat daerah
  
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan :
  - a. Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur Administrasi Kependudukan (PKS)
  - b. Kegiatan DAK pelayanan administrasi kependudukan ( Non Fisik )
  - c. Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
  - d. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  
7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, dengan :
  - a. Kegiatan Validasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan
  - b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Berstandar ISO 9001-2015

## PRIORITAS KEDUA

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
  - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - b. Rehabilitasi bangunan gedung kantor
  
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan
  - a. Peningkatan SDM aparatur administrasi kependudukan
  - b. Sosialisasi kebijakan kependudukan
  
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan informasi dan publikasi yang dapat di akses oleh masyarakat.
  - b. Penyusunan profil perkembangan kependudukan dan agregat kependudukan.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**A. Berdasarkan Usulan Awal OPD**

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA
<b>PRIORITAS PERTAMA</b>		
Total Dana		<b>Rp. 1.989.360.500,-</b>
I	Program pelayanan administrasi perkantoran dengan :	<b>Rp. 635.463.500,-</b>
	a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 2.700.000,-
	b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 72.187.500,-
	c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 122.866.000,-
	d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 114.000.000,-
	e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Rp. 15.000.000,-
	f. Kegiatan penyediaan barang cetak dan pengadaan	Rp. 48.360.000,-
	g. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 7.000.000,-
	h. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Rp. 12.200.000,-
	i. Kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 241.150.000,-
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :	<b>Rp. 190.650.000,-</b>
	a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 117.650.000,-
	b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp. 50.000.000,-
	c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Rp. 23.000.000,-
III	Program peningkatan disiplin aparatur dengan	<b>Rp. 0</b>
	a. Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Rp. 0,-
IV	Program peningkatan SDM Aparatur dengan kegiatan :	<b>Rp. 57.000.000,-</b>
	c. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp. 57.000.000,-
V	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan :	<b>Rp. 380.000,-</b>
	a. Penyusunan laporan kinerja keuangan perangkat daerah	Rp. 380.000,-
VI	Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan	<b>Rp. 914.867.000,-</b>

	a. Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur Administrasi Kependudukan (PKS)	Rp. 126.770.000,-
	b. Kegiatan DAK pelayanan administrasi kependudukan ( Non Fisik )	Rp. 627.422.000,-
	c. Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Rp. 13.240.000,-
	d. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 147.435.000,-
VII.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Darta	<b>Rp. 191.000.000,-</b>
	a. Kegiatan Validasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan	Rp. 115.000.000,-
	b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Berstandar ISO 9001-2015	Rp. 76.000.000,-
<b>PRIORITAS KEDUA</b>		
Total Dana		<b>Rp. 1.032725.000,-</b>
I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :	<b>Rp. 874.050.000,-</b>
	a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp. 350.000.000,-
	b. Rehabilitasi bangunan gedung kantor	Rp. 524.050.000,-
II	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan kegiatan :	Rp. 158.675.000,-
	a. Penyediaan informasi dan publikasi yang dapat di akses oleh masyarakat.	Rp. 100.000.000,-
	b. Penyusunan profil perkembangan kependudukan dan agregat kependudukan.	Rp. 58.675.000,-

**B. Berdasarkan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2019, BAB V**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA
<b>PRIORITAS PERTAMA</b>		
Total dana :		<b>Rp. 1.880.476.000,-</b>
I	Program pelayanan administrasi perkantoran dengan :	<b>Rp. 661.435.000,-</b>
	a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 4.200.000,-
	b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 62.300.000,-
	c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 116.100.000,-
	d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 114.000.000,-
	e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Rp. 20.000.000,-



	f. Kegiatan penyediaan barang cetak dan pengadaan g. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman i. Kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 49.485.000,- Rp. 9.000.000,- Rp. 12.200.000,- Rp. 274.150.000,-
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :	<b>Rp. 190.650.000,-</b>
	a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Rp. 75.000.000,- Rp. 28.875.000,-
III	Program peningkatan disiplin aparatur dengan	<b>Rp. 52.668.000,-</b>
	b. Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Rp. 52.668.000,- 0,-
IV	Program peningkatan SDM Aparatur dengan kegiatan :	<b>Rp. 25.000.000,-</b>
	d. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp. 25.000.000,-
V	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan :	<b>Rp. 380.000,-</b>
	a. Penyusunan laporan kinerja keuangan perangkat daerah	Rp. 380.000,-
VI	Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan	<b>Rp. 860.754.000,-</b>
	a. Kegiatan DAK pelayanan administrasi kependudukan ( Non Fisik ) b. Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Kegiatan Penataan Arsip Vital dan aplikasi Penatausahaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil e. Kegiatan Percepatan Perekaman KTP- el dan peristiwa penting lainnya pada moment tertentu	Rp. 126.770.000,- Rp. 619.497.000,- Rp. 31.722.000,- Rp. 29.500.000,- Rp. 37.720.000,-
VII.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Darta	<b>Rp. 176.364.000,-</b>
	a. Kegiatan Pengelolaan dan pengoperasian SIAK secara terpadu/Pengelolaan Website b. Monitoring, Evaluasi, Validasi dan Pemutahiran data Kependudukan c. Peningkatan Pelayanan Berstandarkan ISO 9001 : 2015	Rp. 56.364.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 70.000.000,-

<b>PRIORITAS KEDUA</b>		
Total dana		<b>Rp. 1.277.375.000,-</b>
I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan	<b>Rp. 1.025.000.000,-</b>
	a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor c. Rehabilitasi bangunan gedung kantor	Rp. 350.000.000,- Rp. 150.000.000,- Rp. 525.000.000,-
II	Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan :	<b>Rp. 93.875.000,-</b>
	a. Peningkatan SDM Aparatur Administrasi Kependudukan b. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Rp. 28.875.000,- Rp. 65.000.000,-
III	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan kegiatan :	<b>Rp. 158.500.000,-</b>
	c. Penyediaan informasi dan publikasi yang dapat di akses oleh masyarakat. d. Penyusunan profil perkembangan kependudukan dan agregat kependudukan.	Rp. 100.000.000,- Rp. 58.675.000,-

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020  
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jumlah Program Prioritas Utama 7  
 Jumlah Kegiatan Prioritas Utama 23  
 Pagu Indikatif 1.880.476.000

Jumlah Program Prioritas Kedua 3  
 Jumlah Kegiatan Prioritas Kedua 7  
 Pagu Indikatif 1.277.375.000

**PRIORITAS UTAMA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					1.880.476.000				2.388.405.000

1	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			661.435.000				799.900.000
1	06	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembelian meterai, dan paket yang dikirimkan	Padang Panjang	700 meterai dan 6 kali jasa kirim surat	4.200.000	APBD		700 meterai dan 6 kali jasa kirim surat	4.500.000
1	06	01	02	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, air, listrik, tv dan jasa pengelola website	Padang Panjang	48 tagihan dan 12 bulan jasa pengelola website	62.300.000	APBD		48 tagihan dan 12 bulan jasa pengelola website	87.000.000
1	06	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Padang Panjang	3 roda 4 dan 6 roda 2	116.100.000	APBD		3 roda 4 dan 6 roda 2	140.000.000
1	06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan/Jaga Kantor dan alat kebersihan yang tersedia	Padang Panjang	bahan/alat kebersihan dan jasa 4 orang petugas	114.000.000	APBD		bahan/alat kebersihan dan jasa 4 orang petugas	137.500.000
1	06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	Padang Panjang	30 jenis	20.000.000	APBD		30 jenis	22.000.000
1	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah foto copy yang disediakan	Padang Panjang	Tersedianya amplop, map, spanduk dll	49.485.000	APBD		Tersedianya amplop, map, spanduk dll	60.000.000

1	06	01	12	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	Padang Panjang	Alat listrik dan elektronik	9.000.000	APBD		Alat listrik dan elektronik	9.900.000
1	06	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	Padang Panjang	250 Ok	12.200.000	APBD		250 ok	19.000.000
1	06	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	dalam dan luar daerah	35 kali	274.150.000	APBD		40 kali	320.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas yang profesional</b>			<b>103.875.000</b>				<b>50.965.000</b>
1	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Padang Panjang	1 unit	75.000.000	APBD		1 unit	19.965.000
1	06	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Padang Panjang	1 tahun	28.875.000	APBD		1 tahun	31.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>3</b>		<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Peningkatan disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas yang profesional</b>			<b>52.668.000</b>				<b>52.668.000</b>
1	06	3	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian	Padang Panjang	60 stel	52.668.000	APBD		60 stel	52.668.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan kapasitas SDM</b>			<b>25.000.000</b>				<b>30.000.000</b>

1	06	05	03	Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bintek dan diklat	Padang Panjang	6 orang	25.000.000	APBD		6 orang	30.000.000
1	06	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu</b>			<b>380.000</b>				<b>380.000</b>
1	06	06	01	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	Padang Panjang	12 laporan	265.000	APBD		12 laporan	265.000
1	06	06	02	Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, Renja, Lkkip, LKPJ, LPPD, SPIP, Penetapan Kinerja	Padang Panjang	8 laporan	115.000	APBD		8 laporan	115.000
1	06	15		<b>Program Pentaan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah produk administrasi kependudukan yang dilayani</b>			<b>860.754.000</b>				<b>1.082.492.000</b>
1	06	15	51	DAK pelayanan administrasi kependudukan	Kepuasan masyarakat	Padang Panjang	IKM sangat baik	619.497.000	APBD		IKM sangat baik	724.000.000
1	06	15	32	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Frekwensi koordinasi	Padang Panjang	2 kali rapat koordinasi	31.722.000	APBD		2 kali rapat koordinasi	35.000.000

1	06	15	46	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah akta yang diterbitkan	Padang Panjang	80% penduduk memiliki akta kelahiran	142.315.000	APBD		80% penduduk memiliki akta kelahiran	250.000.000
1	06	15	47	Penataan Arsip Vital dan Aplikasi Penatausahaan dokument Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Arsip Vital	Padang Panjang	100 Dokumen	29.500.000	APBD		100 Dokumen	32.000.000
1	06	15	49	Percepatan Perekaman e-KTP dan peristiwa penting lainnya pada moment tertentu		Padang Panjang	100% usia wajib KTP telah merekam	37.720.000	APBD		100% usia wajib KTP telah merekam	41.492.000
1	06	16		<b>Program Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan data Administrasi dan</b>				<b>176.364.000</b>			<b>-</b>	<b>372.000.000</b>
1	06	16	01	Pengelolaan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu/Pengelolaan Website	Data Akurat	Padang Panjang	95% data akurat antara data layanan dengan data di pusat	56.364.000	APBD		95% data akurat antara data layanan dengan data di pusat	62.000.000
1	06	16	14	Monitoring, Evaluasi, Validasi dan Pemutahiran Data Kependudukan	Jumlah Validasi Data KK	Padang Panjang	Validasi Data 15.000 KK	50.000.000	APBD		Validasi Data 15.000 KK	150.000.000

1	06	16	50	Peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001 : 2015	Padang Panjang	100% Pelayanan sesuai SOP dan Standar Pelayanan	70.000.000	APBD		100% Pelayanan sesuai SOP dan Standar Pelayanan	160.000.000
---	----	----	----	--	----------------	---	------------	------	--	---	-------------

**PRIORITAS KEDUA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					<b>1.277.375.000</b>			<b>441.350.000</b>			
1	06	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas yang profesional		1.025.000.000			150.000.000		
1	06	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	Padang Panjang	1 unit roda 4	350.000.000	APBD	-	-



1	06	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Padang Panjang	Running tex 2 unit, komputer 2 unit, finger KTP 1 unit, Iris Mata KTP 1 unit, Signature KTP 1 unit, Camera 1 unit, kulkas 1 unit	150.000.000			1 Paket	150.000.000
1	06	02	23	Rehabilitasi bangunan gedung kantor	Jumlah bangunan yang direhab kantor	Padang Panjang	1 unit	525.000.000	APBD		-	-
1	06	15		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah produk administrasi kependudukan yang dilayani</b>			<b>93.875.000</b>				<b>102.000.000</b>
1	06	15	11	Peningkatan SDM Aparatur Administrasi Kependudukan	Aparatur Adm Kependudukan yang mengikuti Bintek	Padang Panjang	15 orang	28.875.000	APBD		15 orang	32.000.000
1	06	15	12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Frekuensi Kegiatan Sosialisasi	Padang Panjang	250 orang peserta	65.000.000	APBD		250 orang peserta	70.000.000
1	06	16		<b>Program Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan data</b>	<b>Ketersediaan Data Base Kependudukan</b>		ada	<b>158.500.000</b>				<b>189.350.000</b>
1	06	16	44	Penyediaan informasi dan publikasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah media yang digunakan dapat diakses masyarakat	Padang Panjang	5 Medsos, 10 Cetak, 2 elektronik	100.000.000	APBD		5 Medsos, 10 Cetak, 2 elektronik	125.000.000

1	06	15	45	Penyusunan buku profil perkembangan kependudukan dan agregat kependudukan	Jumlah buku profil dan agregat	Padang Panjang	100 buku profil dan 100 buku Agregat	58.500.000	APBD		100 buku profil dan 100 buku Agregat	64.350.000
---	----	----	----	---	--------------------------------	----------------	--------------------------------------	------------	------	--	--------------------------------------	------------

Padang Panjang, September 2018  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KOTA PADANG PANJANG

Dra. MAINI, MM  
 NIP, 19640505 199003 2 007

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Catatan Penting**

Renja digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan yang telah disepakati. Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi juga menjadi titik tolak dalam pencapaian visi misi yang telah dirumuskan dalam Renstra maupun RPJMD

### **B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan. Adapun kaidah yang diambil adalah :

1. Rencana kerja ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2019-2024.
2. Penyusunan renja ini juga memperhatikan aspirasi masyarakat melalui musrenbang serta pengamatan langsung lapangan.
3. Renja ini bisa tersusun setelah sebelumnya dilakukan evaluasi terhadap realisasi pencapaian target kinerja baik dari segi fisik maupun dari segi keuangannya.
4. Diharapkan kepada seluruh pelaksana kegiatan agar memaksimalkan kegiatan- kegiatan dengan anggaran yang tersedia sehingga hasilnya dapat memenuhi target kinerja

### **C. Rencana Tindak Lanjut**

Dengan tersusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang akan dapat dicapai tahun 2019 dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun-tahun berikutnya.

Padang Panjang,     September 2018

**KEPALA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PADANG PANJANG**

**Dra. MAINI, MM  
Pembina Tk I, NIP.19640505 199003 2 007**